

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari penulisan skripsi ini bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Probolinggo terkait Patologi Birokrasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Zonasi Di Kota Probolinggo, maka di temukan beberapa bentuk patologi birokrasi yang masih umum di jumpai didalam pemerintahan baik di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Adapun bentuk-bentuk patologi tersebut secara umum ada 6 bentuk : 1) Tidak cekatan dan mutu pelayanan yang rendah; 2) Kurang Disiplin ; 3) Diskriminasi/perbedaan pelayanan; 4) Pelayanan Berbelit-belit; 5) Sikap Aparatur yang Tidak Responsif; 6) Gratifikasi.

Berbagai bentuk patologi tersebut tentu menjadi sebuah masalah yang sangat krusial untuk di lakukan pencarian solusi terhadapnya. Hal yang lebih penting untuk di kaji bersama bahwa beberapa dari patologi tersebut khususnya yang terlihat jelas dan berdampak besar terhadap kepuasan masyarakat justru tidak dipahami oleh masyarakat dan aparatur pemerintah dan menganggap bahwa patologi tersebut bukanlah sebuah bentuk patologi. Hal ini bisa dilihat contohnya pada kasus “ Uang Terima kasih” yang secara teori ialah bagian dari gratifikasi namun dianggap hal yang sah-sah saja. Oleh karena itu pengedukasian penting dilakukan baik untuk masyarakat maupun aparatur itu sendiri.

Lahirnya beberapa bentuk patologi diatas juga tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya : 1) Lemahnya faktor moral; 2) Lemahnya Pengawasan; 3) Sanksi yang tidak tegas; 4) Gaji rendah.

Beberapa deskripsi di atas kemudian sudah cukup untuk menjelaskan bahwa birokrasi kita yang semakin modern sesuai dengan perkembangan zaman nyatanya masih saja terjangkit berbagai penyakit dan tentunya harus segera ditemukan solusi dan terapinya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan pelatihan intensif terkait pentingnya moral dan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparat Negara.
2. Pemerintah sebaiknya lebih transparan terkait berbagai standar operasional prosedur kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan aparatur Negara. Hal ini di harapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pemohon dan mengurangi semaksimal mungkin terjadinya patologi birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
3. Perlunya inovasi-inovasi baru baik dalam rangka peningkatan pengawasan maupun inovasi terkait peningkatan pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam Penerimaan Peserta didik baru jalur zonasi agar di

perketat kembali dalam pelaksanaannya seperti peningkatan pemanfaatan *Eletronic Government*, perampingan prosedur penerbitan dokumen dan lain-lain. Hal ini tentu dapat meminimalisir kesan berbelit- belit pada birokrasi dan juga meminimalisir penggunaan waktu yang selalu saja menjadi salah satu indikator utama kepuasan masyarakat.